

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDUKASI PEMBERDAYAAN
KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DIMASA PANDEMI COVID 19 DI DESA
GUNUNG BUNDER, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR 10
APRIL 2021**

Dr. Joko Trimulyo, SH,M.Pd¹

jokotrimulyo@gmail.com

Institut Agama Islam Sahid Bogor

Abstrak

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan ekonomi keluarga, terutama di wilayah pedesaan seperti Kampung Pabuaran, Desa Gunung Bunder 1, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Sahid Bogor bertujuan untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat dalam menghadapi krisis ini. Kegiatan ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan serta pengembangan jiwa kewirausahaan sebagai upaya peningkatan ketahanan ekonomi keluarga. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, pengabdian ini melibatkan dosen, mahasiswa, serta tokoh masyarakat dalam

penyuluhan berbasis kebijakan publik dan nilai-nilai Pancasila. Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan ekonomi dan kebijakan publik yang berorientasi pada lingkungan sosial. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam menjawab tantangan sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Ketahanan Ekonomi, Pandemi Covid-19, Edukasi Masyarakat, Kebijakan Publik

ANALISIS SITUASI

Situasi dan kondisi Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan khususnya kondisi sosial ekonomi dan kesehatan pada masyarakat pedesaan nyaris sangat tidak berdaya hal ini terjadi sebagai akibat dari Pandemi Covid19 yang masih berlangsung dan dibelenggu ketidakpastian kapan berakhirnya wabah Corona.

Dampak yang paling buruk adalah terjadinya gelombang besar Pemutusan Hubungan Kerja di berbagai mayoritas perusahaan di tanah air, Inflasi meroket, banyak pengangguran, daya beli masyarakat rendah, UMKM tertganggu, sektor riil tidak berjalan sebagaimana mustinya. Masyarakat di berbagai Pedesaan di Kabupen Bogor, sangat nelangsa akibat dampak yang ditimbulkan pandemi Covid19, bukan saja lingkup RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota bahkan negara –negara belahan dunia lainnya turut terdampak, ekonomi mandeg,

daya beli rendah pendapatan masyarakat kususnya lingkup keluarga pada posisi zero income.

Oleh sebab itu dalam menjalankan fungsi Tri Dharma Prguruan Tinggi maka Institut Agama Islam Sahid melalui staf pengajar/dosen memiliki tupoksi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat terpanggil untuk melakukan salah satu dharma ketiga yaitu pengabdian masyarakat dalam menghadapi situasi tidak menentu sebagai akibat pandemi covid19,

Program Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid memiliki SDM yang mumpuni untuk menjalankan peran dan kiprahnya dalam pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari Program Strata :

1. S1 PG PAUD
2. S1.PGMI

3. S1.MPDI

Dengan latar belakang disiplin ilmu tersebut diatas, maka sudah layak Institut Agama Islam Sahid Bogor melalui peran dosennya dapat berpartisipasi aktif mengedukasi masyarakat di pedesaan sekitar kampus untuk turut serta memberikan sumbangsinya dalam menghadapi situasi pandemi covid19 dimaksud dengan cara memberikan pencerahan betapa pentingnya pemberdayaan ketahanan ekonomi keluarga dimasa sulid seperti sekarang ini inovasi. Salah satu bentuk inovasi adalah pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) – khususnya dalam formasi kebijakan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perspektif formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah di Indonesia sebenarnya dapat dimasukkan paradigma negara organik dan korporatis ataupun neo-statist, karena dalam kebijakan umum pemerintah Indonesia memberikan kesempatan pada pranata-pranata sosial atau lembaga keswadayaan masyarakat untuk turut mewarnai pembangunan, sementara pemerintah pusat dan juga daerah baik langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah atau bahkan memaksakan kehendaknya dengan dalih demi kepentingan umum atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Mengingat ketiga karakteristik negara tersebut kental di Indonesia maka hal ini dapat disebut sebagai perwujudan paradigma campuran antara negara organik, korporatis dan neo-statist. Jika dibuat ilustrasi yaitu bagaimanapun seorang bapak menjamin kebebasan sang anak, namun dalam prinsip-prinsip tertentu seorang anak diwajibkan mengikuti pola pikir dan atau sikap sang bapak, jika tidak demikian sang anak tidak akan mendapatkan respon dari sang bapak. Hakim (1993) dalam analisisnya mengisyaratkan bahwa negara sedang berkembang umumnya mempunyai

peranan yang deterministik, menentukan dalam kehidupan sosial walaupun secara finansial ataupun yang lainnya mempunyai kemampuan terbatas, namun keinginannya melakukan fungsi-fungsi penetratif lebih besar dibanding dengan negara-negara maju. Karenanya dalam konteks daerah, Hardjono (1983) mengatakan bahwa banyak program pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan teknokratis bersifat top down. Sebagai contoh pembangunan pertanian melalui "revolusi hijau" yang ditujukan untuk mencapai swasembada beras.

Keberadaan pranata formal yang lahirnya dibidani oleh pemerintah pusat, seperti; Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk di dalamnya HIPPA menandakan kuatnya campur tangan pemerintah dalam urusan pemerintahan desa, sekaligus kadang-kadang juga berarti menunjukkan ketakberdayaan pranata sosial desa yang bersifat tradisional. Kondisi ini semakin kentara manakala dilihat dari menguatnya peran pemerintah dalam mengendalikan pranata sosial formal, semakin memberikan kejelasan bahwa posisi pranata sosial swadaya masyarakat terlihat lemah dan kurang berdaya. Hal terakhir dapat diatasi kecuali jika situasi yang diciptakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tunggal di desa dapat diejawantahkan dalam bentuk yang luwes (fleksibel) dan berfihak kepada anggota masyarakat (warga desa). Jika situasi terakhir tersebut dapat diciptakan maka pertanda sifat "bifrontal dan segmenter" sebagai ciri Otoritarisme Birokrasi yang ditengarai dalam studi Guillermo O'Donnel pada tahun 1980-an, dapat dihindari atau diperkecil secara perlahan-lahan (Mas'ood, 1989:). Namun campur tangan (penetrasi) negara ke dalam desa tersebut dirasa masih perlu dicermati karena negara menuntut monopoli pengabsahan atas lembaga-lembaga dan prosedur yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik dan ekonomi warga desa (Mas'ood, 1994: 126). Hal ini juga terbukti dengan adanya legitimasi keputusan-keputusan desa oleh fihak Pemerintah Kabupaten ataupun Kota.

a. Pranata Sosial Informal

Pranata sosial yang berasal dari warga desa dianggap semakin penting, karena

kemungkinan besar akan mampu menghantar warga desa pada cita-citanya. Karenaya tidaklah mengherankan jika pentingnya kelembagaan masyarakat yang berswadaya di pedesaan telah banyak ditulis oleh pakar pembangunan pedesaan.

Bunch (1992: 267-268) menuturkan pentingnya kelembagaan tersebut; pertama, karena banyak masalah yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga, seperti perkreditan, pembasmian hama, penyebaran inovasi pertanian dan lain-lain di samping, dapat berperan sebagai perantara antara lembaga yang bergerak secara makro/ besar dan warga. Kedua, karena dapat memberi kelanggengan pada warga desa untuk terus menerus mengembangkan usahanya, seperti untuk mengembangkan teknologi dan menyebarkannya. Ketiga, karena dapat mengorganisasi warga desa untuk dapat bersaing dengan pihak luar. Dengan demikian menampakkan bahwa tatkala lembaga-lembaga tradisional tidak lagi mampu mengentas permasalahan warga yang rasional maka tampillah lembaga-lembaga modern menjadi alternatif pemecahan masalah. Ketika masalah pembangunan mulai mengemuka, maka lembaga-lembaga modern yang dapat mengadopsi unsur-unsur perubahan sosial yang terjadi, menjadi sangat dibutuhkan. Akibatnya terjadi pergeseran peranan lembaga dari sifat tradisional-komunal menjadi lembaga asosional yang didasarkan pada rasio atau kepentingan (Lihat Sartono, 1990:78).

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita pranata sosial biasanya ditempuh beberapa jalan. Menurut analisis Sanit (1994: 190); "Cara yang lazim dimanfaatkan oleh lembaga kemasyarakatan dalam rangka memperjuangkan kepentingan dan tujuannya, yaitu mengembangkan kemampuan seluruh warga, terutama para pemimpin supaya handal mencapai tujuan

pribadi bersamaan dengan tujuan lembaga". Untuk itu diusahakan supaya pengetahuan dan penguasaan teknologi segenap warga dan pimpinan ditingkatkan. Pendidikan dan latihan merupakan sarana untuk mencapai sasaran ini.

Di samping itu, fasilitas dipandang sebagai unsur penting pula dalam usaha lembaga kemasyarakatan mencapai tujuannya. Berkenaan dengan itu usaha untuk meningkatkan fasilitas bagi usaha-usaha lembaga/ pranata dijalankan secara terus-menerus, dengan menggunakan cara-cara tertentu dengan memanfaatkan teknologi setepat mungkin atau teknologi tepat guna. Untuk menutupi kemampuan teknis keorganisasian tersebut di atas, maka lembaga kemasyarakatan cenderung memanfaatkan kekuatan massanya di samping menggunakan rasa simpati dan dukungan masyarakat luas (Sanit, 1994: 192).

Berbagai teknik yang dimanfaatkan di dalam perjuangan politis dari organisasi kemasyarakatan ialah, memanipulasikan pendapat umum (public opinion). Bagi pendukung lobby organisasi kemasyarakatan terhadap pemerintah, penguasa, birokrasi, seperti juga menghadapi lembaga kemasyarakatan lainnya; maka dapat diselenggarakan musyawarah untuk mencapai kemufakatan, usul-usul yang bersifat informal, bulan bakti, sarasehan, simulasi, dan penjelasan-penjelasan umum lainnya. Pendapat umum yang terbentuk oleh kegiatan tersebut akan menjadi kekuatan bagi lembaga tersebut. Dewasa ini teknik utama bagi perjuangan lembaga kemasyarakatan ialah membujuk dan lobby. Penggunaan pendapat umum amat tipis, hampir tidak dikenali lagi rapat umum (kecuali di masa kampanye untuk pemilihan umum) (Sanit, 1994: 194).

Seperti diketahui bahwa kelompok swadaya masyarakat muncul atas inisiatif masyarakat sendiri dengan tujuan pokok memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat baik secara individual maupun secara kelompok.

Kuatnya kelompok ini disebabkan karena dasar persaudaraan dan perasaan senasib dalam menghadapi kesulitan menjadi determinan utama. Melalui kelompok yang dapat membawa aspirasi bersama, masyarakat akan dapat lebih banyak ikut serta dalam proses pembangunan yang partisipatif, yaitu proses pembangunan dimana masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan rencana, menggunakan hasil pembangunan, menikmati hasilnya dan pada gilirannya ikut melestarikan hasil-hasilnya (Sumodinigrat dan Mudrajat, 1990).

Kelompok swadaya masyarakat mandiri mempunyai karakteristik: pertama menyadari permasalahan yang mereka hadapi, kedua mengetahui potensi dan kelemahan yang melekat pada dirinya, dan ketiga menentukan pilihan terhadap berbagai alternatif yang ada dengan memperhitungkan kesempatan dan ancaman yang ada (Ismawan dan Kartjono, 1985: 36). Kelompok swadaya masyarakat atau pranata sosial yang mandiri biasanya berasal dari kelompok-kelompok kecil di wilayah yang amat kecil juga, misalnya di tingkat Rukun Tetangga (RT), tingkat Rukun Warga (RW) atau di pedukuhan atau pedusunan. Pranata sosial yang beranggotakan kelompok-kelompok kecil dari bagian masyarakat ini biasanya lebih efektif dalam kegiatannya sehingga seringkali sumbangsuhnya tidak sedikit terhadap roda pemerintahan dalam proses pembangunan fisik maupun nonfisik. Tjondronegoro, (1977) menjelaskan: "Kelompok selapanan yang ada pada masing-masing dusun dapat menjadi forum bagi masyarakat untuk menggalang sumberdaya yang mereka miliki". Karena, tingkat lembaga atau kelompok yang bisa membangkitkan partisipasi anggota adalah pada tingkat pedusunan, dengan anggota beberapa puluh Kepala Keluarga (KK) dan melepaskannya dari ikatan erat dengan gugus kepamongan. Hal ini yang kemudian nampaknya mengilhami lahirnya persepuluhan pada kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa-desa maupun di perkotaan (Mubyarto, dkk., 1994: 62).

Kelompok swadaya masyarakat merupakan pengejawantahan dari semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas dengan manfaat sumberdaya yang mereka miliki. Swadaya masyarakat juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat.

Aktivitas lembaga masyarakat ini berkaitan langsung dengan kepentingan keseluruhan anggota atau pendukung lembaga itu sendiri. Dikemukakan seperti itu, karena tidaklah dapat diabaikan adanya kenyataan bahwa pembentukan lembaga dimaksudkan untuk melayani kepentingan anggota atau pendukung tersebut. Karena kepentingan pada hakekatnya merupakan perwujudan dari satu atau beberapa aspek kehidupan, maka aktivitas lembagaapun diarahkan kepada aspek kehidupan yang menjadi perhatian atau kepentingan utama dari anggota ataupun pendukung lembaga yang bersangkutan (Sanit, 1995: 181). Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan, pertama kali tentulah tujuan organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi keperluan anggotanya sebaik mungkin. Kesejahteraan anggota secara umum dianggap sebagai sasaran utama lembaga semacam itu.

Dalam nada yang mirip seperti di atas Ismunawan (1992: 86) menuturkan: "Kelompok swadaya masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama". Dengan kata lain, kelompok swadaya masyarakat merupakan suatu alat yang dapat menggerakkan sumber daya desa guna mempertinggi pencapaian kesejahteraan bersama. Di samping itu, kelompok swadaya masyarakat merupakan wahana bagi terselenggaranya proses belajar-mengajar dan pengambilan keputusan. Adanya kelompok seperti ini akan menjadikan swadaya masyarakat lebih *berprospek* (Mubyarto, dkk., 1994: 208).

Dengan demikian menurut hasil penelitian Mubyarto dkk., (1994) ditemukan adanya peran positif dari lembaga swadaya masyarakat baik dalam tataran perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dalam wacana empiris hal ini nampak tidak dapat dielakkan, karena jiwa guyub rukun (gotong-royong) yang menjadi bagian integral kehidupan bermasyarakat bagi bangsa Indonesia (yang merembes pada pranata sosial) tidak mudah dapat dikikis habis oleh era kesejagadan (globalisasi).

Di Indonesia kedua lembaga tersebut secara teoritik diharapkan berjalan beriringan dan saling bahu-membahu, baik dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Pola integrasi kelembagaan, dengan demikian mengarah pada integrasi antar lembaga-lembaga formal dan informal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan, walaupun harus diakui bahwa model perencanaan atau kebijakan pembangunan yang bersifat top down masih sangat kuat (Ismani, 1991: 56). Kerangka ideal ini memperlihatkan bahwa keinginan elit politik di negeri ini semakin kokoh manakala dilihat dalam perspektif normatif. Kehendak elit politik pemegang tampuk pemerintahan yang antara lain tercermin di dalam peraturan perundang-undangan menganggap perlu merampatkan mekanisme atau birokrasi mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Padahal pada tataran empirik masing-masing desa dalam daerah tertentu tentunya memiliki karakteristik cukup berbeda. Karenanya perlakuan yang sama dalam upaya pembinaan pemerintah adalah suatu hal yang patut dipertanyakan.

Jauh sebelum ilmuwan modern berbicara tentang kebijakan publik yang sarat nilai dan atau berbasis lingkungan, didalam syariat Islam justru meletakkan sistem nilai yang berbasis tauhid niscaya mendasari seluruh sistem kehidupan manusia. Do'a yang sangat populer diabadikan di dalam Al-Quran (Surat Al Bhaqarah :) mengisyaratkan tentang

dibutuhkannya nilai-nilai yang trasendental, sakral dan monumental harus selalu bersanding dengan nilai-nilai yang proven duniawi. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang Kebijakan Publik para ahli sepakat tentang nilai-nilai yang ada didalamnya. Tidak ada kebijakan publik yang tidak sarat nilai. Jika diperhatikan kehidupan masyarakat dan bangsa di dunia ini maka tidak satupun didalam sistem pergaulan sosial maupun hal-hal yang bertalian dengan kebijakan publik yang tidak menampakan penerapan sistem nilai yang diakui dan tumbuh kembangkan oleh masyarakat dan bangsa tersebut. Sistem nilai terbaik di dunia yang telah dikristalisasi oleh *founding fathers* bangsa Indonesia antara lain Soekarno (Presiden Pertama Republik Indonesia) yaitu Pancasila. Pancasila tidak berlebihan jika disebut fondasi sistem nilai terbaik di dunia karena mewakili nilai-nilai yang mapan dan *sophisticated* yang niscaya dapat di terima oleh dunia.

Pada tataran empirik semua orang dapat membaca bahwa kebijakan publik yang diakui syarat nilai namun sama sekali tidak memperhitungkan nilai-nilai agama pada saat proses pembuatan kebijakan publik. Jauh di tahun 1990-an Guru Besar Ilmu Administrasi Publik (Miftah Thoha, 1994) Universitas Gajahmada (UGM) memperingatkan tentang kelemahan kebijakan publik yang tidak menyertakan nilai-nilai keagamaan. Sementara (Indarwanto, 2011) mensaratkan bahwa setiap kebijakan publik itu niscaya selalu didasarkan pada nilai nilai Ketuhanan yang terejahwantah di dalam :

1. Keimanan
2. Keadilan
3. Kejujuran
4. Kebenaran
5. Kebijakan
6. Ketulusan
7. Kecintaan
8. Kekerabatan
9. Kesukuan
10. Kebangsaan
11. Kesemestaan

Tidak ada artinya sejumlah institusi pendidikan tinggi dan pencinta lingkungan hidup yang terorganisasi serta suara ulama berbicara tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan hidup jika tidak diikuti atau diimbangi *political will* dari pemerintah secara nyata. Untuk itu kerjasama yang terintegrasi antara berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah keniscayaan yang utama.

Sependapat dengan Treanor, 2001 bahwa untuk mewujudkan pembangunan atau kebijakan publik yang berwawasan lingkungan tidak sekedar dibutuhkannya suara mayoritas. Tidak jarang suara mayoritas yang merupakan ciri dasar demokrasi dalam memenangkan opsi kebijakan publik mencederai hati nurani rakyat. Demokrasi adalah bentuk lain dari kebohongan terstruktur yang berbasis suara mayoritas.

Pendapat ini merupakan peringatan bagi insan terdidik agar lebih mencermati serta berhati-hati ketika merekomendasikan penerapan demokrasi di bumi pertiwi. Tanpa bermaksud sekedar menghisap jempol maka jika memang harus berbicara demokrasi, Demokrasi Pancasila adalah keniscayaan untuk diterima sebagai format berbangsa dan bernegara (Soekarno, 1964 dan Latief, 2013).

Nilai nilai sakral dan ideal didalam Pancasila pasti dapat diterapkan didalam kehidupan sehari-hari sebab nilai tersebut justru digali dan diambil dari nilai nilai yang tumbuh dan berkembang di Indonesia-bahkan nilai nilai dasar yang ada diseluruh dunia.

Ketika kita berbicara nilai didalam kebijakan publik yang berbasis lingkungan, pendekatan lintas disiplin ilmu adalah keniscayaan untuk itu perspektif hukum lingkungan harus menjadi salah satu pilar formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik (Supriadi, 2006). Tidak

kalah pentingnya pendekatan yang berbasis sosiologi kesehatan lingkungan termasuk didalamnya manajemen atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan menjadi keharusan untuk dijadikan penyanggah kebijakan publik (Sarudji, 2006, Mitchel, Setiawan, Hadi Rahmi, 2000, Sarudji, Ed., 2009, Soemarwoto, 1996, Dwi Susilo, 2012).

Berdasar sejumlah pendekatan teoritik tersebut jika disimpulkan bahwa kebijakan publik yang berbasis lingkungan didalamnya niscaya terdapat unsur :

1. Nilai nilai Idiologis atau Filosofis,
2. Nilai nilai kearifan lokal
3. Nilai guna spiritual dan fisik
4. Hukum lingkungan,
5. Kesehatan lingkungan,
6. Keberlangsungan flora dan fauna,
7. Keberlanjutan pembangunan yang berbasis lingkungan

Dimensi dimensi kebijakan yang nampaknya lengkap tersebut masih menyisakan permasalahan empirik namun sering kali dikatakan tidak ilmiah yaitu dimensi alam ghaib. Pada tatanan empirik saat diimplementasikan sebuah kebijakan tidak jarang dihadapkan pada masalah yang ghaib. Masalah masalah tersebut antara lain;

- a) Kesurupan massal sejumlah siswa disuatu institusi,
- b) Kesurupan massal disejumlah perusahaan,
- c) Pohon sulit ditebang saat akan memulai pembangunan
- d) Mesin produksi tidak dapat dioperasikan meskipun kondisinya baik
- e) Penampakan makhluk ghaib diruang kelas atau ruang kerja, dll

Meskipun sejumlah hal tersebut diatas tidak selalu terjadi dalam keseharian namun cukup mengganggu proses belajar mengajar maupun proses produksi termasuk didalamnya proses pelaksanaan pembangunan sarana prasarana. Oleh sebab itu sudah waktunya kebijakan publik yang berorientasi lingkungan juga menyertakan

atau menghitung dimensi ghaib didalam formulasi, implementasi, dan evaluasi. Hal ini dirasa penting atau bahkan dibutuhkan jika benar benar ingin meningkatkan kualitas kebijakan publik yang berorientasi lingkungan.

IV. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Masalah merupakan kesenjangan antara harapan (das ein) dengan kenyataan (das sollen). Harapan dunia kerja setiap lulusan perguruan tinggi memiliki kapabilitas yang tidak sekedar teoritis namun lebih dari itu juga harus mampu menjawab permasalahan yang nyata.

Bertalian dengan itu masalah yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Apakah upaya yang dilakukan dalam pengebdian kepada masyarakat desa di Kampung Pabuaran , Desa Gunung Bunder !, Kecamatan Pamijahan , Kabupaten Bogor, tidak berbenturan dengan kebijakan pranata sosial yang sdh dulu berkembang dan selama ini sudah berjalan?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan guna mewujudkan penyadaran kepada masyarakat yang efektif pentingnya memberdayakan ketahanan ekonomi keluarga ditengah pandemi covid19 ?
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya protokol kesehatan selama masa PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Bogor. bagaimana merubah mindset masyarakat?

V. TUJUAN KEGIATAN

1. Untuk Mengedukasi masyarakat betapa pentingnya pemberdayaan dan ketahanan ekonomi keluarga ditengah masa pandemi Covid19.
2. Untuk memberi penyadaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya protokol kesehatan selama pandemi Covid19.
3. PKM ini bertujuan untuk lebih membekali masyarakat agar memiliki jiwa kewirausahaan dan menemukan potensi desa untuk diberdayakan komoditasnya agar bernilai ekonomi

VI. MANFAAT KEGIATAN

Manfaat dari kegiatan ini antara lain :

- a. Bagi masyarakat sasaran kegiatan di pedesaan Gunung Bunder 1, Kecamatan Pamijahan Kabupatrtren Bogor :

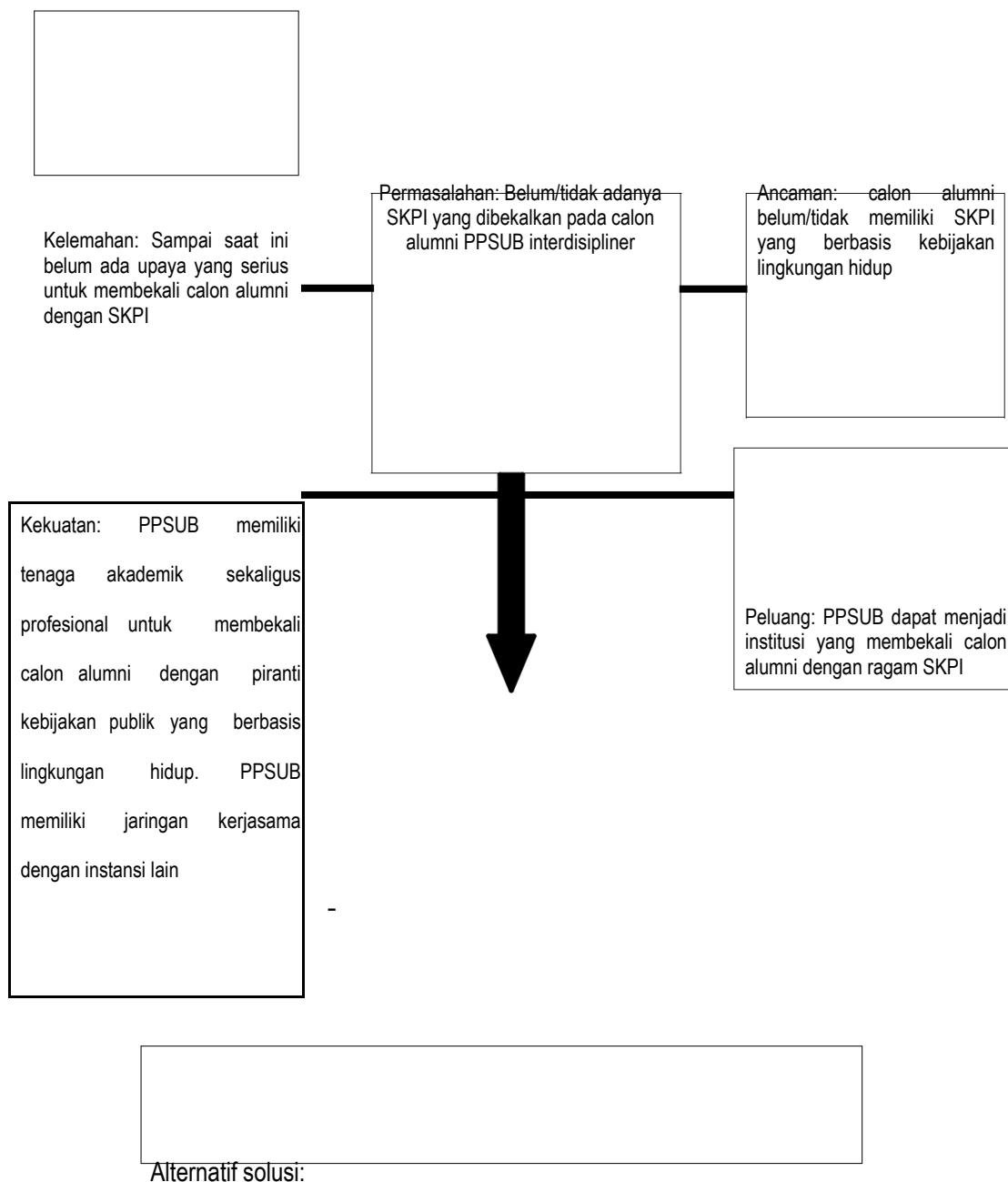
1. Menambah wawasan secara praksis tentang kebijakan publik yang berorientasi pada lingkungan warga sekitar obyek pengabdian.
2. Melatih para warga agar mempunyai daya kreatif dan inofativ hal-hal apa saja terkait dengan potensi desa yang bernilai ekonomi dan bermanfaat
3. Membekali para anggota masyarakat dipedesaan memiliki jiwa yang tangguh menhadapi kesulitan ekonomi untuk meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan antar para warga.

- b. Bagi dosen :

1. Meningkatkan kualitas dosen dalam ikut berperan aktif memberikan sumbangsih kepada warga dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.
2. Mewujudkan peranan dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu
3. Dapat meningkatkan meningkatkan angka kredit dosen dalam berkarier.

VII. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Untuk memberikan kontribusi pada masyarakat pada desa yang menjadi sasaran obyek pengabdian kepada masyarakat, khususnya dosen yang program studinya berorientasi pada manajemen pendidikan, diharapkan dengan bekal pendidikan dan latihan analisis kebijakan khususnya dalam fase formulasi yang berorientasi pada lingkungan sosial pedesaan, maka diharapkan solusi yang ditawarkan oleh Dosen dalam pengabdianannya mampu memberikan jawaban sesuai yang diharapkan policy makers, policy stakeholders dan masyarakat pada umumnya khususnya yang berkaitan dengan hal-hal pemberdayaan dan ketahanan ekonomi keluarga di pedesaan..



- Membuat pendidikan dan pelatihan tentang kebijakan yang berorientasi lingkungan hidup

VIII. KHALAYAK SASARAN ANTARA : perguruan Tinggi khususnya Dhara ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat kepada warga sebagai masyarakat, juga melibatkan stake holder (pemangku kepentingan) agar setelah lulus mendapatkan penyuluhan dan pencerahan memiliki kemampuan tambahan yang positif. Diharapkan mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mampu membaca

Para Warga khususnya desa Pabuaran Gunung Bunder 1, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

IX. KETERKAITAN

Kegiatan pengabdian ini merupakan kemampuan, peluang dan membuat solusi pengejawantahan nyata dari Tri Dharma

terhadap permasalahan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

X. METODE PELAKSANAAN

1. Analisis permasalahan, kebutuhan khalayak sasaran antara, dan sumber daya yang tersedia adalah tahap awal yang dilakukan pertama kali. Selanjutnya, informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan persiapan dan penyusunan proposal pengabdian;
2. Penyusunan materi penyuluhan dan edukasi berikut instruktur yang memiliki kapabilitas di bidang proses pemberdayaan ekonomi umat yang berorientasi pada lingkungan sosial masyarakat pedesaan.
3. Evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan akhir.

XI. RANCANGAN EVALUASI

Evaluasi kegiatan dilakukan pada setiap awal dan akhir proses yang dilakukan dengan cara mengkritisi materi yang diberikan pada saat pendidikan dan pelatihan, capaian yang diharapkan dari kegiatan dapat diketahui.

Capaian yang diharapkan	Kriteria keberhasilan yang ditargetkan
Peningkatan pemahaman calon alumni terhadap kebijakan publik yang berorientasi lingkungan	• 90% paham terhadap kebijakan publik yang berorientasi lingkungan hidup • 80% calon alumni mampu membuat konsep kebijakan publik yang berorientasi Lingkungan • 90% calon alumni paham tentang dibutuhkannya kebijakan publik yang berorientasi lingkungan
Peningkatan kualitas calon alumni terhadap pemahaman kebijakan publik yang berorientasi lingkungan hidup	• 90 % peserta pendidikan dan latihan dapat mengikuti sampai paripurna
90 % mampu membuat konsep kebijakan publik yang berorientasi lingkungan	• 90 % mampu membuat konsep kebijakan publik yang berorientasi lingkungan

XII. RENCANA DAN JADWAL PENGABDIAN

Tahapan kegiatan	M	A	M	J	J	A	S
Survei, penyusunan proposal dan modul/ <i>leaflet</i>	V	v	v				
Koordinasi sivitas akademika JBUB dengan warga desa			v				
Pengenalan dan penjelasan konsep desa agroekowisata				v	v		
Evaluasi kegiatan			v	v	v		
Pembuatan presentasi & laporan akhir			v	v	V	v	v

XIII. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta.
- Amien, M. Rais, 2010, *Selamatkan Indonesia*, PT Gramedia Jakarta
- Bunch, Roland, 1992, *Dua Tongkol Jagung*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Dunn, William, 1995, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta.
- Hakim, Luqman, 1193, *Peranan Negara Dalam Kehidupan Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*, dalam jurnal Ilmu Politik, Nomor 14 tahun 1993: 21-29
- Harjono, Joan, 1983, *Rural Develpoment in Indonesia: The Top Down Approach* dalam David A.M dan D. . Chaudri (Ed...) *Rural Develpoment and The State*, Metthuen, London
- Indarwanto, 2003, *Teori Kebijakan Publik dalam Perspektif Transendental*, Taroda, Malang.
- Islami, Moch. Irfan, 1993, *Prinsip-prinsip Kebijakan Publik*, Jakarta.
- Ismani, H. A., 1991, *Sosiologi Pembangunan Desa*, Diterbitkan Atas Kerjasama PPIIS dan FIA Universitas Brawijaya Malang
- Ismunawan, Bambang dan Kartjono, 1985, *Kemandirian Kelompok Swadaya dan Peranannya dalam Menciptakan Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, dalam Mubyarto (Ed.), *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, BPFE, Yogyakarta
- Ismunawan, Bambang, 1992, *Partisipasi dan Dimensi Keswadayaan dalam Pengembangan Swadaya Nasional: Tinjuan Ke Arah Persepsi Yang Utuh*, LP3ES, Jakarta
- Latief, Yudhi, 2013, *Pancasila*, Jakarta.
- Mas'ood, Mohtar, 1989, *Ekonomi dan Stuktur Politik: Orde Baru 1966-1971*, LP3ES, Jakarta
- Mas'ood, Mohtar, 1994, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mitchel, Bruce, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, 2000, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- Mubiarto, dkk., 1994, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, P3PK Universitas Gajahmada Yogyakarta dan Aditya Media Yogyakarta
- Sanit, Arbi, 1995, *Ormas dan Politik*, Penerbit LSIP, Jakarta
- Soemarwoto, Otto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarudji, Didik, 2006, *Kesehatan Lingkungan*, Mitra Meraih Prestasi, Surabaya.

Susilo, Rachmad K. Dwi, 2012, *Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, Ar-Ruzz Media, Jakarta

Sarudji, Didik, 2009, *Wawasan Lingkungan*, Media Ilmu, Surabaya.

Suratmo, F. Gunarwan, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press

Siregar, Doli D., 2004, *Manajemen Aset*, PT. Kresna Prima Persada, Jakarta.

Soekarno, 1964, *Dibawah Bendera Revolusi*, Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Jakarta.

Tjondronegoro, S. Soediono M. P., 1977, *Lembaga Swadaya Masyarakat*, LP3ES, Jakarta
Trenor, Paul, 2001, *Kebohongan Demokrasi*, Istawa, Yogyakarta.

XV.LAMPIRAN

MATERI PENDIDIKAN DAN LATIHAN FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK
BERBASIS LINGKUNGAN

NO	MATERI	PEMATERI	MODERATOR
1	Memahami Formulasi Kebijakan Publik berbasis Lingkungan		
2	Formulasi Sebagai Pilar Kebijakan Publik		
3	Intervensi Pemerintah Terhadap Kebutuhan Publik		
4	Keterlibatan Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan Publik		
5	Peran Lembaga Sosial Dalam Formulasi Kebijakan Publik		
6	Isu Sosial Berbasis Kebutuhan Masyarakat		
7	Masalah Formulasi Kebijakan Publik		
8	Perumusan Masalah Dalam Formulasi Kebijakan Publik		
9	Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Publik		

10	Formulasi Kebijakan Publik Berbasis Lingkungan Ideologis		
11	Agenda Publik Sebagai Basis Kebijakan Publik		